

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kampung, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bagian dari organisasi pemerintah, kampung memiliki peran strategis, terutama dalam melaksanakan tugas pelayanan publik.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung telah mengatur keuangan dan aset Kampung dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung menyatakan bahwa keuangan Kampung adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul / hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan NKRI dan juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi,akuntabilitas,dan efektivitas pengelolaan keuangan kampung guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kampung secara berkelanjutan.

Selain Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Kampung, pemerintah juga mengeluarkan PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung yang diterima dari dana APBN dan langsung diterima oleh Kampung. Menurut Kementerian Kampung, dana desa tersebut akan diterima sebesar 3% di tahun 2015, meningkat hingga 6% pada tahun 2016, sampai pada tahun 2017 mencapai 10% dan dana Kampung dapat berjumlah hingga 1

Milyar. Dana Kampung yang cukup besar itu menuntut aparaturnya harus dapat dipertanggungjawabkannya baik pemerintahan pusat maupun kepada masyarakat.

Dana Kampung dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap, Dana Kampung dihitung berdasarkan jumlah Kampung dan dialokasikan dengan memperhatikan Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan Tingkat Kesulitan Geografis. Tujuan Dana Kampung ialah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian Kampung, mengatasi kesenjangan pembangunan antar Kampung, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dana Kampung yang diberikan ini diharapkan dapat membuat desa/kampung menjadi mandiri dan sejahtera, untuk itu dana desa harus dapat dilaksanakan oleh aparaturnya desa/kampung bersama masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* diantaranya Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi, maka aparaturnya desa/kampung dan masyarakat harus memiliki pemahaman atas peraturan perundangan dan ketentuan lainnya serta mampu memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kampung sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan Kampung yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat Kampung yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di Kampung sangat kompleks, menjadikan alasan bagi Kampung untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap Kampung tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan Kampung harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat Kampung yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan Kampung tidak terlepas dari perencanaan

pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan Kampung harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan Kampung.

Selain Akuntabilitas untuk pelaksanaan Pemerintahan yang baik juga diperlukan adanya unsur Transparansi. Transparansi merupakan salah satu aspek yang mendasar agar terwujudnya pemerintahan yang baik. Perwujudan dari pemerintahan yang baik adalah dengan keterbukaan, keterlibatan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian yang dilakukan oleh (Yanti & Tiswiyanti, 2023) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh secara positif terhadap pengelolaan keuangan kampung. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fisik harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fisik, informasi, dan penjabarannya.

Kabupaten Jayapura adalah salah satu lokasi di Indonesia yang terus berkembang setiap tahun. Kabupaten Jayapura merupakan wilayah pemekaran dari Kota Jayapura. Tahun 1993 Kabupaten Jayapura mengalami pemekaran menjadi Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993, dan Kabupaten Jayapura memindahkan ibu kotanya ke Sentani menurut Keputusan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Jayapura. Distrik Sentani yang merupakan ibukota dari Kabupaten Jayapura sehingga pastinya mengalami perkembangan setiap tahun.

Jumlah penduduk di Distrik sentani pada tahun 2011 berjumlah 44.779 jiwa meningkat menjadi 71.192 jiwa pada tahun 2021 (BPS, 2021). Dengan meningkatnya jumlah

penduduk di Distrik Sentani, fasilitas sosial dan ekonomi juga ikut meningkat. Jumlah fasilitas sosial pada tahun 2011 sebanyak 499 unit kemudian meningkat menjadi 828 unit pada tahun 2021. Aksesibilitas di Distrik Sentani juga ikut meningkat dalam kurun waktu 10 tahun tersebut, pemerintah Kabupaten Jayapura melakukan pelebaran jalan, penambahan jalan dan perbaikan perkerasan jalan. bertambahnya jumlah penduduk dan fasilitas sosial ekonomi membuat kebutuhan lahan di Distrik Sentani juga menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan di Distrik Sentani. (Awom et al., 2023)

Pemerintah Kabupaten Jayapura memberikan Alokasi Dana Kampung tahun anggaran 2024 di 139 Kampung yang berada di Kabupaten Jayapura, total anggaran Alokasi Dana Kampung tahun 2024 sebesar Rp2,77 triliun, angka tersebut naik sebanyak 3,25 persen dibanding tahun 2023 sebesar Rp 2,68 triliun. Jumlah ADK 2024 untuk Kabupaten Jayapura sebesar kurang lebih Rp120 miliar, meningkat dari tahun 2023 lalu sebesar Rp117 miliar untuk 139 kampung. Pembagian ADK 2024 untuk 139 kampung ada berkisar kurang lebih Rp300-Rp500 juta. kegunaan ADK 2024 setiap desa atau kampung di Indonesia akan mengacu kepada tujuh program prioritas nasional. Diantaranya memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. (antaranews.com, 2024)

Sentani Timur adalah sebuah Distrik yang berada di Kabupaten Jayapura, Papua, dengan total populasi 9,694 jiwa dengan luas 484,4 km<sup>2</sup> dan Sentani Timur memiliki 7 Kampung yaitu Kampung Asei besar, Asei kecil, Ayapo, Nolakla, Puay, Yokiwa. Kampung Asei Kecil merupakan daerah terluas yaitu 140,78 Km<sup>2</sup> atau sebesar 29,07 persen dari total luas Distrik. Sedangkan Kampung Itakiwa merupakan daerah terkecil dengan luas 7,29 Km<sup>2</sup> atau sebesar 1,51 persen dari total luas Distrik Sentani Timur.

Permasalahan yang sering terjadi di Kampung Distrik Sentani Timur yaitu tentang pelaksanaan Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK), permasalahan pembangunan masyarakat kampung di Papua semakin mengemuka sejalan dengan makin banyaknya pemberitaan tentang berbagai persoalan yang terjadi seperti merebaknya konflik social di beberapa tempat yang dipicu berbagai ketimpangan social dalam pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi : pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur. Salah satunya fenomena nyata yang hampir terjadi diberbagai kampung di daerah sentani secara khusus kampung Nolakla. Permasalahan yang dihadapi masyarakat kampung Nolakla adalah menurut Mantan Ketua Bamuskam Kampung Nolakla Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, Yoram Ohee dalam Berita Tabloit Papua Baru, terpaksa harus melaporkan Kepala Kampung Nolakla ke Kepolisian Resor (Polres) dengan dugaan memalsukan tanda tangan untuk Dana Kampung dan juga dana bantuan langsung tunai (BLT) dan setelah di telusuri ternyata ada 11 nama ketua kelompok Tani yang juga di palsukan tanda tangannya oleh kepala Kampung Nolakla untuk menerima dana sebesar 5 juta rupiah, selain pemalsuan tanda tangan 11 ketua Kelompok Tani, tanda tangan Kepala Sekolah PAUD Merpati juga di palsukan, untuk PAUD Merpati besaran dana yang diselewengkan adalah sebesar Rp. 50 juta yang dibayarkan dalam 2 tahap. Namun setelah di konfirmasi ke kepada Kepala Sekolah PAUD yang bersangkutan menyatakan tidak pernah menerima dana tersebut.

Selain PAUD Merpati, Kepala Sekolah SD Lentera Kampung Harapan juga dipalsukan tanda tangannya untuk menerima dana sebesar Rp. 39 juta dan kepala sekolah menyatakan bahwa tidak pernah ada bantuan dari kampung Nolakla. seluruh warga Kampung Nolakla juga sudah mengkonfirmasi kepada oknum Kepala Kampung tersebut dan oknum Kepala Kampung pun mengakui, bahwa telah memalsukan tanda tangan tersebut dan seluruh masyarakat Kampung Nolakla telah melaporkan Kepala Kampung ke polres jayapura

Dengan laporan tersebut, masyarakat berharap Kepolisian Resor Jayapura agar dapat sesegera mungkin mengambil langkah hukum untuk menindak oknum Kepala Kampung tersebut. Karena menurut masyarakat Kampung Nolakla hal yang dilakukan oleh oknum kepala kampung ini sudah menciderai jabatan yang dipercayakan kepadanya dan juga telah merugikan orang banyak. (*Tabloit Papua, 2023*)

Beberapa penelitian mengenai Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Kampung telah dilakukan antara lain (Sukmawati & Nurfitriani, 2019) dan (Garung & Ga, 2020). Hasil penelitian Sukmawati dan Nurfitriani menunjukkan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hasil Penelitian dari Garung & Ga menunjukkan bahwa Akuntabilitas secara parsial dan secara simultan berpengaruh signifikan, terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Penelitian ini mereprikasikan Penelitian dari Fitri Sukmawati yang di lakukan pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa”. Perbedaan dari penelitian yang saya lakukan dari penelitian sebelumnya yaitu dari lokasi penelitian, lokasi penelitian sebelumnya berada di Kabupaten Garut sedangkan penelitian yang akan saya lakukan di Distrik Sentani Timur di Tahun 2024.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Kampung Pada Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua”. Dalam rangka menguji efektifitas penerapan praktik Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Kampung pada Distrik Sentani Timur untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada Kampung Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura?
2. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada Kampung Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura?
3. Apakah Akuntabilitas dan Transparansi Berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada Kampung Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui Pengaruh Akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah pada Kampung Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.
2. Mengetahui Pengaruh Transparansi terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah pada Kampung Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.
3. Mengetahui apakah ada pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Kampung pada Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.

## **1.4 Manfaat Peneliti**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat, baik dari aspek teori maupun aspek praktis, serta bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Adapun manfaat peneliti yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat dalam penelitian ini yaitu dengan menerapkan Prinsip Akuntabilitas, dan Transparansi, pada Kampung Distrik Sentani Timur dapat meningkatkan pengelolaan keuangan mereka dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

2. Manfaat dalam penelitian ini yaitu, diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada Masyarakat Kampung Distrik Sentani Timur dan memberikan landasan untuk peningkatan kinerja Keuangan dimasa yang akan datang.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam pembahasan Skripsi ini penulis akan menguraikan kedalam 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan menjabarkan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penelitian ini dan juga berisi tentang referensi yang dianggap representatif dalam bidang pembahasan dan teori-teori yang relevan untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diteliti (terdiri dari kerangka pikir dan hipotesis).

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan dibahas mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode analisis dan definisi operasional variabel.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bab yang berisi analisis data yang telah diperoleh dalam penelitian. Analisis data yang dilakukan meliputi analisis statistik yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian.



## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian penutup dari skripsi ini dalam bab ini disajikan kesimpulan kesimpulan serta saran-saran.